Akuntabilitas koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah

Benedicta Adinsa Bella Savira^a, Indira Januarti^b

^a BCA, Surabaya, Indonesia; benedictaadinsa@gmail.com

^b Fakultas Ekonomika & Bisnis; Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia;
ienjanuarti@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Artikel dikirim 05-09-2019

Revised 03-11-2019

Artikel diterima 15-11-2019

Keywords:

Audit, asset, liability, liquidity, members

Kata Kunci:

Audit, aset, liabilitas, likuiditas, anggota

ABSTRACT

Cooperatives' executives rely on audited financial statements as a form of accountability to their members. The number of savings and loan cooperatives (KSP – Koperasi Simpan Pinjam) in Indonesia is growing rapidly. However, the issue of audit demands by cooperatives in Indonesia is still relatively understudied. Thus, this study seeks to empirically investigate the effects of cooperatives' size (number of members and total assets) and financial indicators (liquidity and liabilities) on audit demands. The research sample is 108 primary cooperatives in Central Java Province generated from the Provincial Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) of Central Java that have savings and loans units. The logistic regression analysis demonstrates that number of members, total assets, and liabilities positively affect audit demand. However, liquidity ratio does not affect audit demand.

ABSTRAK

Audit laporan keuangan diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap Anggota. Jumlah koperasi simpan pinjam di Indonesia tumbuh dengan pesat. Masih sangat jarang penelitian yang meneliti mengenai audit yang dilakukan oleh koperasi, oleh sebab itu penelitian ini perlu dilakukan, Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh besaran koperasi (jumlah anggota dan total aset) dan aspek keuangan (likuiditas dan kewajiban) terhadap permintaan jasa audit. Penelitian ini menggunakan koperasi primer tingkat provinsi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP). Sampel 108 koperasi yang ditentukan menggunakan metode convenience sampling. Alat analisis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan jumlah anggota, total aset, dan jumlah kewajiban berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit. Variabel rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perseorangan dan dikelola oleh pengurus yang ditunjuk anggota koperasi. Dalam menjalankan usahanya,

koperasi berasaskan kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dalam Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Indonesia Pasal 37, pengurus koperasi diwajibkan memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan anggota koperasi di Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal ini, laporan keuangan yang disajikan harus relevan, dapat dipercaya, mudah dimengerti, lengkap, mempunyai daya banding, dan disajikan tepat waktu agar tidak menyesatkan pemakainya.

Pengambilan keputusan ekonomi bermanfaat jika informasi akuntansi memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas. Untuk memenuhi dua kriteria di atas maka perlu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan koperasi oleh pihak independen, dalam hal ini akuntan publik. Audit atas laporan keuangan koperasi dikuatkan oleh Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Indonesia pasal 40, bahwa laporan keuangan koperasi dapat diaudit oleh auditor eksternal. Permintaan jasa audit eksternal penting dilakukan untuk menghindari konflik yang dapat terjadi antara pengguna (anggota, pihak ketiga) dengan pembuat laporan keuangan (pengurus) serta untuk meningkatkan keandalan fungsi laporan keuangan (Januarti & Nasir, 2006). Berbagai kasus yang terjadi pada koperasi (Koperasi Cipaganti, Pandawa) mengingatkan para pemilik koperasi bahwa audit atas laporan keuangan menjadi penting. Banyaknya kasus yang terjadi dalam koperasi menunjukkan tata kelola koperasi belum dilaksanakan secara optimal. Tata kelola seharusnya diimplementasikan untuk membangun budaya dan memotivasi *agent* (pengurus atau pengelola) agar memerhatikan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan anggotanya (Pradnyaswari & Putri, 2016).

Tata kelola yang baik sangat diperlukan di koperasi. Peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas di koperasi bertujuan agar tidak merugikan pihak manapun. Profesionalitas dan akuntabilitas dapat diterapkan dengan memanfaatkan jasa audit atas laporan keuangan. Audit bertujuan untuk memberikan pernyataan atas kewajaran, dalam semua hal yang material, dan sesuai dengan kerangka Standar Audit 200 (IAPI, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan koperasi harus mempertahankan prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi dengan salah satu cara adalah melakukan permintaan jasa audit eksternal. Audit laporan keuangan di koperasi sifatnya sukarela, kecuali untuk koperasi dengan nilai omset di atas Rp5.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi pasal 36 yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib diaudit oleh akuntan publik. Beberapa faktor yang diduga mampu mempengaruhi permintaan jasa audit terhadap koperasi, yakni: jumlah anggota, jumlah aset, jumlah kewajiban, dan rasio likuiditas (Januarti & Nasir, 2006; Utaminingsih & Hidayah, 2012).

Jumlah anggota yang besar di koperasi mengindikasikan kepercayaan

masyarakat terhadap koperasi tersebut, sehingga tuntutan untuk menjadi koperasi akuntabel sangat besar. Penelitian Ardiansah (2012); Januarti & Nasir (2006); Lisa (2013); Utaminingsih & Hidayah (2012); Wahyuningsih & Jumawan (2009) memberikan bukti empiris bahwa banyaknya anggota berpengaruh positif terhadap permintaan audit. Sedangkan hasil negatif dan tidak signifikan diperoleh dari penelitian (Utama, 2019).

Aset yang besar di koperasi menunjukkan besarnya kekayaan yang dimiliki koperasi yang membuat tuntutan semakin tinggi untuk mengelola aset dengan baik. Hal ini membuat audit menjadi salah satu sarana untuk memberikan keyakinan kepada anggota bahwa laporan keuangan sudah secara wajar menyajikan nilai aset. Hasil penelitian Ardiansah (2012) menggunakan ukuran pertumbuhan untuk besaran koperasi memberikan hasil yang positif terhadap permintaan audit. Sary, Agusti, & Safitri (2014); Imam & Alfurkaniati (2014); Putra, Julianto, & Sujana (2017); Utama (2019) juga memberikan hasil positif untuk ukuran koperasi. Namun penelitian Januarti & Nasir (2006); Lisa (2013); Utaminingsih & Hidayah (2012) memberikan hasil yang bertentangan.

Koperasi yang mempunyai jumlah liabilitas tinggi menunjukkan bahwa koperasi tersebut dipercaya untuk diberi pinjaman. Oleh sebab itu, audit menjadi salah satu sarana terbaik untuk meyakinkan kepada pemberi pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan dikelola dengan baik. Penelitian Putra *et al.*, (2017); Imam & Alfurkaniati (2014); Ardiansah (2012); Januarti & Nasir (2006) memberikan bukti empiris bahwa liabilitas berpengaruh positif terhadap permintaan audit, sedangkan hasil yang bertentangan diperoleh dari penelitian Lisa (2013); Wahyuningsih & Jumawan (2009). Hasil dari Wahab *et al.* (2018) bahwa rasio *gearing* negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan audit.

Rasio likuiditas yang baik menunjukkan aktivitas operasional koperasi berjalan dengan baik. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan koperasi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Untuk memberikan keyakinan yang memadai, maka audit atas laporan keuangan menjadi bentuk akuntabilitas koperasi. Ardiansah (2012); Utaminingsih & Hidayah (2012); Wahyuningsih & Jumawan (2009) memberikan bukti bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap permintaan audit. Hasil yang negatif dan tidak signifikan diperoleh dari penelitian Sary *et al.* (2014), Imam & Alfurkaniati (2014); Wahab *et al.* (2018) serta Utama (2019).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ardiansah (2012) yang menggunakan sampel koperasi di Kotamadya Semarang tahun 2004-2005 dan Wahyuningsih & Jumawan (2009) yang meneliti koperasi di Kabupaten Kampar tahun 2009. Secara lebih rinci, penelitian ini menggunakan sampel koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah tahun 2017 karena pertumbuhan koperasi jenis ini sangat pesat dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya. Berdasarkan data triwulan IV tahun 2017 dari Dinas Koperasi Jawa Tengah dari 153.171 koperasi yang ada di Indonesia 21.455 ada di Jawa

Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan masih sedikitnya penelitian tentang akuntabilitas koperasi, maka penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh besaran koperasi (jumlah anggota dan jumlah aset) dan komponen keuangan (jumlah kewajiban, rasio likuiditas) terhadap permintaan jasa audit. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai audit laporan keuangan yang dilakukan koperasi sebagai salah satu bentuk penerapan akuntabilitas untuk mencapai *Good Corporate Governance (GCG)*, serta memberikan masukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM agar selalu memberikan bimbingan kepada koperasi yang belum melakukan audit untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Indonesia pasal 1, koperasi didefinisikan sebagai “suatu badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan perolehan modal untuk menjalankan usaha berdasarkan pemisahan kekayaan para anggotanya”. Berdasarkan Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Indonesia pasal 5 “Koperasi mempunyai nilai-nilai yang mendasari kegiatan perkoperasian, yaitu: kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian

Pemegang saham di koperasi adalah anggota, sedangkan pengelola koperasi adalah pengurus yang dibantu manajemen. Pengurus koperasi ditunjuk oleh anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sesuai dengan *agency theory*, pengurus bertindak sebagai agen sedangkan anggota sebagai pemilik. Dalam pelaksanaan kegiatan koperasi, dimungkinkan timbul asimetri informasi antara pengurus dengan anggota koperasi.

Kasus yang terjadi dalam koperasi disebabkan oleh lemahnya implementasi tata kelola (*corporate governance*). Maka dari itu, penerapan tata kelola pada koperasi penting untuk diperhatikan. Definisi *corporate governance (CG)* adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban para pemegang kepentingan tersebut. *CG* diharapkan dapat memberikan *value added* untuk semua pihak yang terkait (FCGI, 2003).

Prinsip *GCG* dibutuhkan supaya tercapai kesinambungan koperasi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan anggota. Prinsip-prinsip *GCG* menjadikan koperasi akuntabel, transparan, dikelola secara profesional, efisien dan efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *GCG*, koperasi dapat memiliki keunggulan komparatif yang dapat mengungguli unit usaha lain. Dengan demikian, diharapkan koperasi dapat

mempertahankan perannya yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia.

Saat ini tata kelola yang baik (*good governance*) tengah banyak diperbincangkan salah satunya oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi bersaing dengan unit usaha untuk melayani anggotanya. Untuk itu koperasi harus memiliki keunggulan komparatif (Iskandar & Suryono, 2015). Pelayanan prima dan kesejahteraan bersama harus menjadi fokus utama koperasi. Tuntutan ini dianggap wajar dan sudah seharusnya mendapat respon dari pengurus koperasi agar dapat terwujud penyelenggaraan koperasi yang baik.

Setiap tahun pengurus diminta mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan koperasi dengan membuat laporan keuangan. Untuk menilai apakah laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus andal, maka diperlukan pihak ketiga yang independen yaitu auditor sebagai pihak eksternal yang memberikan jasa audit. Audit tersebut merupakan salah satu dari fungsi *corporate governance*. Hasil audit laporan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya. Standar Audit 200 menjelaskan, tujuan audit atas laporan keuangan memberikan “pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perubahan ekuitas, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” (IAPI, 2013). Audit laporan keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Jumlah Anggota Berpengaruh Positif terhadap Permintaan Jasa Audit

Good Corporate Governance Theory sejalan dengan prinsip koperasi yang tercantum dalam Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Indonesia, khususnya Pasal 6 Ayat 1 tentang prinsip koperasi (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2012). Pengelolaan koperasi dan penyampaian pendapat dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilakukan dengan cara demokratis, maksudnya satu anggota memperoleh satu suara. Anggota koperasi mempunyai latar belakang yang beragam, sehingga memiliki pemikiran yang berbeda dalam menyampaikan pendapat. Jumlah anggota mempunyai peranan penting terhadap permintaan jasa audit eksternal. Jika jumlah anggota semakin banyak, maka perbedaan pendapat antar anggota akan semakin banyak juga. Oleh karena itu, kemungkinan koperasi melakukan permintaan audit sebagai penengah perbedaan pendapat tersebut akan semakin besar. Selain itu, semakin banyak jumlah anggota koperasi maka para anggota akan meminta pengurus koperasi untuk melakukan audit atas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Paramita & Hidayanti (2014) memberikan bukti bahwa jumlah anggota berpengaruh positif terhadap permintaan audit.

Selain itu, seiring dengan bertambahnya jumlah anggota maka bertambah juga modal koperasi (Lisa, 2013). Modal yang bertambah membuat koperasi semakin berkembang, demikian juga dengan masalah yang dihadapi koperasi. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus diaudit, maka hipotesis pertama adalah:

H1: Jumlah anggota berpengaruh positif terhadap kemungkinan permintaan jasa audit.

Besaran Koperasi Berpengaruh Positif terhadap Permintaan Jasa Audit

Semakin besar skala koperasi, maka potensi masalah yang kompleks semakin besar (Januarti & Nasir, 2006). Skala koperasi yang semakin besar sering diikuti dengan transaksi keuangan yang semakin tinggi (Utaminingsih & Hidayah, 2012) yang dapat memunculkan potensi kesalahan yang besar dalam pencatatan transaksi. Kesalahan dalam pencatatan transaksi akuntansi dapat menyebabkan informasi dalam laporan keuangan kehilangan keandalannya (Utaminingsih & Hidayah, 2012). Untuk tetap mempertahankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dari kompleksitas transaksi yang tinggi, audit atas laporan keuangan koperasi sangat diperlukan (Utama, 2019). Oleh sebab itu, semakin besar ukuran koperasi, maka koperasi semakin dituntut untuk melakukan audit. Nugrahani & Sabeni (2013); Hasan (2017); Januarti & Wiryaningrum (2018) memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Tengah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, yang mewajibkan audit untuk koperasi dengan nilai omset di atas Rp5.000.000.000,00. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua adalah:

H2: Besaran koperasi berpengaruh positif terhadap kemungkinan permintaan jasa audit eksternal.

Jumlah Liabilitas Berpengaruh Positif terhadap Permintaan Jasa Audit

Dana yang digunakan koperasi untuk melaksanakan kegiatannya dapat berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur serta anggota koperasi. Koperasi berusaha mempertahankan prinsip *GCG* dengan meyakinkan kreditur bahwa dana yang dipinjam oleh koperasi telah digunakan sebagaimana mestinya. Semakin banyak dana koperasi yang berasal dari pinjaman kreditur, maka semakin banyak dana yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya (Utama, 2019). Cara yang dapat digunakan untuk meyakinkan kreditur bahwa dana pinjamannya telah dikelola dengan benar dan aman yaitu dengan meminta audit kepada eksternal auditor (Januarti & Nasir, 2006). Dengan demikian, semakin banyak koperasi mempunyai utang kepada pihak ketiga, maka kemungkinan besar harus melakukan audit atas laporan keuangannya. Pengurus koperasi dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pinjaman dengan transparan dan pihak kreditur juga percaya bahwa dananya telah dikelola dengan benar dan aman. Selain itu, koperasi harus melampirkan laporan keuangan yang diaudit untuk memperoleh pinjaman dari bank (Januarti & Nasir, 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga adalah:

H3: Liabilitas berpengaruh positif terhadap kemungkinan permintaan jasa audit eksternal.

Rasio Likuiditas Berpengaruh Positif terhadap Permintaan Jasa Audit

Koperasi memerlukan dana untuk menjalankan kegiatannya untuk operasional kegiatannya yang berasal dari anggota yang menginvestasikan dananya dan kreditur yang meminjamkan dana (Januarti & Fitrianasari, 2008). Sebelum memberikan pinjaman dana kepada koperasi, kreditur akan mengevaluasi terlebih dahulu kemampuan koperasi untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu. Koperasi dikatakan mempunyai rasio likuiditas yang tinggi jika koperasi tersebut mempunyai aset lancar yang memadai untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan tepat waktu (Utama, 2019).

Koperasi dengan rasio likuiditas yang tinggi berusaha untuk membuktikan kepada kreditur bahwa koperasi tersebut benar-benar mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu (Utaminingsih & Hidayah, 2012). Oleh sebab itu, semakin besar likuiditas koperasi maka semakin mampu untuk membiayai audit atas laporan keuangannya. Hal ini didukung oleh (Ardiansah, 2012) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap permintaan audit. Atas dasar penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat adalah:

H4: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kemungkinan permintaan jasa audit eksternal.

Gambar 1
Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah 250 koperasi primer tingkat provinsi di wilayah

Jawa Tengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah yang mempunyai Unit Simpan Pinjam (USP) dan yang telah membuat laporan keuangan tutup buku 2017, serta melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dengan memilih koperasi simpan pinjam. Sampel penelitian tersebar di berbagai jenis koperasi, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 1 berikut menyajikan jumlah sampel berdasarkan jenis koperasi.

Tabel 1
Sampel Penelitian

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi
KSP	48
KSPPS	43
KSU	15
KPRI	2
Jumlah	108

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Laporan keuangan koperasi yang berhasil dikumpulkan sebanyak 108, dengan rincian 65 laporan keuangan koperasi telah diaudit dan 43 laporan keuangan koperasi belum diaudit. Artinya, laporan keuangan koperasi yang telah diaudit sebanyak 60,19 persen.

Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dependen adalah permintaan jasa audit. Permintaan jasa audit didefinisikan sebagai permintaan koperasi kepada eksternal auditor untuk mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat. Skor 1 diberikan untuk laporan keuangan yang diaudit dan skor 0 jika laporan keuangan tidak diaudit.

Jumlah anggota merupakan banyaknya anggota yang telah membayar simpanan pokok di koperasi. Variabel jumlah anggota ini diukur dengan nilai logaritma natural dari jumlah anggota koperasi yang bersangkutan. Besaran koperasi yang dijadikan kriteria didasarkan pada total aset. Variabel ini diukur dengan nilai logaritma natural dari aset koperasi. Jumlah liabilitas yaitu nilai logaritma natural jumlah hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang koperasi. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan koperasi menyediakan aset lancar untuk membayar hutang jangka pendeknya. Variabel rasio likuiditas diukur dengan membagi aset lancar dengan hutang jangka pendek

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan regresi logistik, karena variabel dependen pada penelitian ini adalah *dummy* (Ghozali, 2016). Adapun persamaan regresi logistik adalah:

$$\frac{P(\text{audit})}{1-P(\text{tidak audit})} = \beta_0 + \beta_1 \text{MEMBER} + \beta_2 \text{SIZE} + \beta_3 \text{LIABILITY} + \beta_4 \text{LIQ_RATIO} \dots\dots\dots 1$$

Keterangan:

P = Koperasi yang diaudit
 1 – P = Koperasi yang tidak diaudit
 MEMBER = Jumlah Anggota
 SIZE = Besaran Koperasi
 LIABILITY = Jumlah Kewajiban
 LIQ_RATIO = Rasio Likuiditas
 β = Koefisien parameter regresi logistik

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan median jumlah anggota untuk koperasi yang diaudit (7.641) lebih banyak dibandingkan dengan koperasi yang tidak diaudit (704). Rata-rata (*mean*) besaran (*size*), jumlah liabilitas (*liability*) koperasi yang diaudit mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan koperasi yang belum diaudit. Sedangkan untuk rasio likuiditas justru koperasi yang diaudit (1,56 persen) mempunyai rasio likuiditas yang lebih rendah dibandingkan koperasi yang tidak diaudit (2,79).

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Keterangan	Audit (N=65)	Tidak Audit (N=43)	Keseluruhan (N=108)
MEMBER	Min	655	202	202
	Max	45.401	5.026	45.401
	Median	7.641,00	704,00	3.885,00
	Std. Dev	8.916,77	1.044,05	8.336,25
SIZE	Min	1.355.351.535	82.902.750	82.902.750
	Max	381.913.563.227	20.250.707.338	381.913.563.227
	Mean	54.334.216.837,04	3.889.966.922,06	34.249.932.148,67
	Std. Dev	69.442.976.289,51	4.257.337.317,08	59.247.595.972,71
LIABILITY	Min	980.226.000	185.853.500	185.853.500
	Max	807.551.398.987	14.816.298.683	807.551.398.987
	Mean	50.930.837.380,04	2.790.823.705,52	31.763.980.083,71
	Std. Dev	104.434.801.388,38	3.591.101.335,79	84.197.189.443,96
LIQ_RATIO	Min	0,29	0,00*	0,00*
	Max	8,61	17,37	17,37
	Mean	1,56	2,79	2,05
	Std. Dev	1,19	3,49	2,45

Sumber : Data diolah

*) 0,0001

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 menunjukkan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel bebas nilainya > 0,1 dan nilai VIF<10, sehingga disimpulkan bebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
MEMBER	0,49	2,06
SIZE	0,17	6,03
LIABILITY	0,24	4,22
LIQ_RATIO	0,97	1,03

Sumber : data diolah

Overall Model Fit

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai $-2LL$ Block Number = 0 yang nilai yang lebih besar daripada $-2LL$ Block Number = 1, artinya model layak untuk digunakan (Ghozali, 2016).

Tabel 4
Overall Model Fit

(-2LL) Block Number = 0	Mempunyai nilai 145,21
(-2LL) Block Number = 1	Mempunyai nilai 45,43

Sumber : data diolah

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat ketepatan peramalan model sebesar 90,7 persen yang berarti bahwa ketepatan variabel-variabel bebas (jumlah anggota, besaran koperasi, jumlah kewajiban, dan rasio likuiditas) yang digunakan untuk memprediksi permintaan audit sebesar 90,7 persen.

Tabel 5
Classification Table

Observed			Predicted		
			Audit demand		Percentage Correct
			Tidak Audit	Audit	
Step 1	Audit Demand	Tidak Audit	39	4	90,7
		Audit	6	59	90,8
Overall Percentage					90,7

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Nilai *Nagelkerke R Square* yang merupakan hasil modifikasi dari *Cox dan Snell's R Square* 0,82. Nilai ini menunjukkan bahwa 82 persen dari variabilitas variabel terikat bisa dijelaskan oleh variabilitas variabel bebas.

Tabel 6
Nagelkerke R Square

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	45,43 ^a	0,60	0,82

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Uji Kelayakan Model Regresi Logistik

Tabel 7 berikut dapat digunakan untuk menguji kelayakan model regresi (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*).

Tabel 7
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	1,81	8	0,99

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pengolahan data, diperoleh informasi bahwa nilai *Chi Square* sebesar 1,81 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,99. Hasil probabilitas signifikansi yang jauh di atas 0,05 menunjukkan bahwa model regresi dapat diterima dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya, karena model mampu memprediksi nilai observasi (Ghozali, 2016). Sementara itu, Tabel 8 menunjukkan nilai *wald member* 12,60 (signifikan 0,00), *size* 5,44 (signifikan 0,03), *liability* 4,96 (signifikan 0,02), rasio likuiditas 0,02 (tidak signifikan 0,90).

Tabel 8
Uji Wald

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	simpulan
MEMBER	0,00	0,00	12,60	1	0,00***	1,001	Diterima
SIZE	0,00*	0,00	5,44	1	0,02	1,00	Diterima
LIABILITY	0,00**	0,00	4,96	1	0,03	1,00	diterima
LIQ_RATIO	-0,022	0,18	0,02	1	0,90	0,98	ditolak
Constant	-3,45	0,89	14,94	1	0,00	0,03	

Sumber : Hasil Pengolahan Data

*) $2,214^{-10}$ **) $3,423^{-10}$ ***) 0,000385

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil pengujian model regresi logistik mendukung hipotesis 1 (sig. 0,00). Jumlah anggota berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit karena arah koefisien positif. Hal ini diperkuat dengan hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel 2 bahwa median jumlah anggota koperasi yang telah melakukan audit lebih besar (7.641) dibandingkan dengan median jumlah anggota koperasi yang belum melakukan audit (704). Hasil penelitian ini sesuai dengan *Good Corporate Governance Theory* yang berpendapat bahwa setiap anggota koperasi dapat menggunakan haknya dalam hal penyampaian pendapat. Bertambahnya jumlah anggota dalam koperasi berpotensi mengakibatkan semakin banyak perbedaan pendapat anggota. Perbedaan pendapat antar anggota yang terjadi dapat ditengahi, salah satunya dengan cara melakukan permintaan jasa audit. Selain itu, semakin banyak jumlah anggota dikoperasi mengakibatkan semakin tingginya tuntutan anggota yang ingin mengetahui kinerja pengurus koperasi. Dalam hal ini, laporan keuangan yang telah diaudit dapat dijadikan bentuk pertanggungjawaban kinerja pengurus koperasi dalam mengelola koperasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ardiansah (2012); Januarti & Nasir (2006); Lisa (2013); Paramita & Hidayanti (2014); Utaminingsih & Hidayah (2012); Wahyuningsih & Jumawa (2009). Namun temuan

ini bertentangan dengan Utama (2019); Imam & Alfurkaniati (2014); Sary *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa jumlah anggota tidak signifikan hasilnya.

Hipotesis 2 juga didukung (sig. 0,02), yang berarti bahwa besaran koperasi berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit. Uji *wald* pada Tabel 8 memperlihatkan bahwa variabel besaran koperasi memiliki arah koefisien positif sebesar 2,214-10. Hal ini diperkuat dengan analisis statistik deskriptif pada Tabel 2 bahwa rata – rata besaran koperasi yang diaudit lebih besar (Rp 54.334.216.837,04) dari rata-rata besaran koperasi yang tidak melakukan audit (Rp 3.889.966.922,06). Hasil penelitian ini sesuai dengan *Good Corporate Governance Theory* yang menjelaskan bahwa prinsip profesionalitas dan akuntabilitas diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi, termasuk koperasi. Semakin besar skala suatu koperasi, maka semakin besar potensi munculnya masalah yang kompleks. Agar dapat mempertahankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas di tengah semakin kompleksnya permasalahan yang muncul karena potensi yang semakin besar, dibutuhkan jasa audit dari pihak eksternal koperasi supaya koperasi dapat menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kriteria relevan dan reliabel. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Utama (2019); Januarti & Wiryaningrum (2018); Sary *et al.*, (2014) ; Imam & Alfurkaniati (2014); Hasan (2017); Putra *et al.*, (2017). Tetapi temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Paramita & Hidayanti (2014) yang menunjukkan besaran koperasi tidak signifikan.

Berdasarkan Tabel 8, hipotesis 3 yang memprediksi bahwa liabilitas koperasi berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit didukung (sig. 0,03). Uji *wald* di Tabel 8 memperlihatkan bahwa variabel jumlah liabilitas koperasi memiliki arah koefisien positif sebesar 3,423-10. Arah positif diperkuat dengan hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel 2, bahwa jumlah kewajiban koperasi yang telah diaudit nilai rata-ratanya Rp 50.930.837.380,04 lebih besar dibandingkan rata-rata jumlah liabilitas koperasi yang tidak diaudit (Rp 2.790.823.705,52). Hasil penelitian ini sesuai dengan *Good Corporate Governance Theory* yang menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi harus dipertahankan dan dijaga dalam menjalankan koperasi. Koperasi yang mendapat pinjaman dana dari kreditur untuk melaksanakan kegiatannya termotivasi untuk meyakinkan kreditur bahwa pinjaman yang diberikan telah dikelola sesuai dengan peruntukannya. Semakin banyak dana koperasi yang berasal dari pinjaman kreditur, maka semakin banyak dana yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya, salah satunya adalah dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan koperasi. Koperasi dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pinjaman dengan transparan dan pihak kreditur juga percaya bahwa dananya telah dikelola dengan benar dan aman. Hasil penelitian mendukung penelitian Januarti & Nasir (2006); Imam & Alfurkaniati (2014); Putra *et al.*, (2017), tetapi bertentangan dengan penelitian Paramita & Hidayanti (2014); Wahab *et al.* (2018).

Rasio likuiditas koperasi tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit (hipotesis 4 ditolak) dengan nilai signifikansi 0,9. Uji *wald* pada Tabel 8

memperlihatkan bahwa variabel rasio likuiditas koperasi memiliki arah koefisien negatif sebesar -0,022. Nilai koefisien negatif dijelaskan dari hasil uji analisis statistik deskriptif pada Tabel 2 bahwa likuiditas koperasi yang diaudit mempunyai nilai rata-rata rasio lebih kecil (1,56) dibandingkan nilai rata-rata rasio likuiditas koperasi yang tidak diaudit (2,79). Tidak sesuai dengan hipotesis dengan hasil penelitian disebabkan kemungkinan karena adanya simpanan sukarela yang berasal dari anggota dikelompokkan ke dalam liabilitas jangka pendek karena dapat diambil sewaktu-waktu. Hal tersebut mengakibatkan liabilitas jangka pendek lebih banyak berasal dari anggota koperasi daripada berasal dari kreditur. Ketika hutang berasal dari anggota sendiri, tuntutan atas audit laporan keuangan tidak begitu besar dibandingkan kalau hutang berasal dari pihak eksternal. Rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Utama (2019); Utaminingsih & Hidayah (2012); Wahab *et al.* (2018).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota, besaran koperasi, dan jumlah liabilitas berpengaruh positif terhadap permintaan audit. Sedangkan rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap permintaan audit di koperasi.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa permintaan jasa audit di koperasi simpan pinjam dipengaruhi oleh faktor permintaan anggota, besaran aset koperasi, dan liabilitas yang dimiliki koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut berusaha untuk menunjukkan tanggungjawab yang telah diberikan kepada anggota dan kreditur dengan menggunakan jasa pihak yang independen dan menjalankan *corporate governance* dengan baik.

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu banyak koperasi simpan pinjam yang tidak bersedia sebagai responden, sehingga belum dapat menggambarkan seluruh jenis koperasi yang ada. Untuk itu penelitian ini menyarankan penelitian mendatang untuk memperluas daerah sampel penelitian sehingga dapat dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam yang ada di Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah, M. N. (2012). Pengaruh karakteristik koperasi terhadap permintaan jasa audit: studi empiris koperasi di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(1), 6–13. <https://doi.org/10.15294/jda.v1i1.1907>
- FCGI. (2003). Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan). In *Forum for Corporate Governance in Indonesia*. Retrieved from https://muharieffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi_booklet_ii.pdf

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Hasan, M. A. (2017). Pengaruh kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit fee. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 214–230.
- IAPI. (2013). *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik*. Jakarta: Institute Akuntan Publik Indonesia.
- Imam, A., & Alfurkaniati. (2014). Pengaruh jumlah anggota, besaran, gearing dan likuiditas terhadap permintaan jasa audit eksternal pada koperasi di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi, Majamemen Dan Akuntansi*, 22(1), 93–105. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Iskandar, B. K., & Suryono, B. (2015). Analisa penerapan prinsip-prinsip good corporate dan pengendalian internal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(10), 1–18.
- Januarti, I., & Fitrianasari, E. (2008). Analisis Rasio Keuangan dan Rasio Non Keuangan yang Mempengaruhi Auditor dalam Memberikan Opini Audit Going Concern pada Auditee (Studi mpiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2000-2005). *MAKSI*, 8(1), 43–58.
- Januarti, I., & Nasir, H. M. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan audit pada KPRI di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen, Akuntansi & Sistem Informasi*, 6(2), 175–186.
- Januarti, I., & Wiryaningrum, M. S. (2018). The Effect of Size, Profitability, Risk, Complexity, and Independent Audit Committee on Audit Fee. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(2), 136–145. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i2.16607>
- Lisa, O. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit eksternal pada koperasi di Jawa Timur. *Jurnal WIGA*, 3(1 (Maret)), 1–11.
- Nugrahani, N. R., & Sabeni, A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan fee audit eksternal pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–11.
- Paramita, R. W. D., & Hidayanti, E. (2014). Pengaruh anggota, skala koperasi, jumlah kewajiban terhadap permintaan audit eksternal (studi pada koperasi se-Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 3(2), 1071–1088.
- Peraturan Daerah koperasi dan usaha kecil menengah Jawa Tengah No. 2 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam*, (2012).

- Pradnyaswari, L., & Putri, I. (2016). Pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1064–1091.
- Putra, P. W. N., Julianto, P., & Sujana, E. (2017). Pengaruh skala koperasi, jumlah kewajiban dan biaya audit terhadap permintaan audit eksternal koperasi (Studi empiris pada koperasi se Kabupaten Badung). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Sary, R., Agusti, R., & Safitri, D. (2014). Pengaruh jumlah anggota, volume usaha dan likuiditas koperasi terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di Kabupaten Kampar. *JOM FEKON*, 1(2), 1–15.
- Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Indonesia.* , (2012).
- Utama, F. R. (2019). Pengaruh jumlah anggota koperasi, size, likuiditas, solvabilitas (leverage), dan rentabilitas koperasi terhadap permintaan jasa audit eksternal. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 125–140.
- Utaminingsih, N. S., & Hidayah, R. (2012). Pengaruh jumlah anggota, volume usaha dan likuiditas koperasi terhadap permintaan jasa audit. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 51–59. <https://doi.org/10.15294/jda.v3i1.1944>
- Wahab, W., Hasan, A., & Andreas. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit akuntan publik pada koperasi di Kabupaten Siak. *Pekbis Jurnal*, 10(3, November), 188–200.
- Wahyuningsih, E., & Jumawan, Y. (2009). Pengaruh jumlah anggota , besaran , gearing, dan likuiditas terhadap permintaan jasa audit eksternal pada koperasi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 15(1), 33–44.